



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP 39)
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, maka dilakukan penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39). Laporan Triwulan II ini merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) terhadap kinerja yang telah dicapai hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi kinerja yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (Perjakin) dan *output* kegiatan, analisis capaian kinerja, hambatan dan kendala serta upaya tindak lanjut yang diperlukan.

Hasil evaluasi kinerja pada Triwulan II ini diharapkan menjadi masukan-masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja BBSPJIA selanjutnya. Selain itu juga, diharapkan menjadi masukan untuk menyusun sasaran strategis dan *output* kegiatan pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya untuk BBSPJIA maupun sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

Bogor, Juli 2025



Yuni Herlina Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	I-1
1.2. Latar Belakang Kegiatan	I-2
1.3. Struktur Organisasi	I-3
BAB II RENCANA KEGIATAN	II-1
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025	II-1
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	II-6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	III-1
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja	III-1
3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Penjanjian Kinerja	III-5
3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Klasifikasi Output Kegiatan	III-26
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	III-30
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	III-30
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	III-32
3.3. Langkah Tindak Lanjut	III-32
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	III-32
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	III-33
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Realisasi Kegiatan	IV-1
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	IV-1
4.3. Langkah Tindak Lanjut	IV-2
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro selanjutnya disebut BBSPJIA mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri agro;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri agro;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri agro;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri agro;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri agro;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009, BBSPJIA ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang mendapatkan kewenangan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Oleh karena itu, BBSPJIA dituntut menjalankan organisasinya secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat industri agro secara lebih baik, transparan, akuntabel, efisien, produktif, dan mandiri.

Prinsip dasar pemerintahan yang baik adalah terdapatnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban secara periodik. Transparan mengandung arti bahwa praktik-praktik instansi pemerintahan akan diketahui umum dan anggota masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi yang benar.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, yang dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan. Periode Laporan Pengendalian dan Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir triwulan.

Merujuk pada peraturan yang disebutkan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang memuat kinerja yang telah dicapai, analisis capaian kinerja, hambatan dan kendala pelaksanaan, serta langkah tindak lanjutnya. Susunan laporan mengacu kepada *Outline* Laporan Triwulan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian RI.

1.2. Latar Belakang Kegiatan

Kementerian Perindustrian telah mengkaji dan menyusun kebijakan-kebijakan nasional pembangunan industri. Dalam kebijakan ini, telah ditentukan

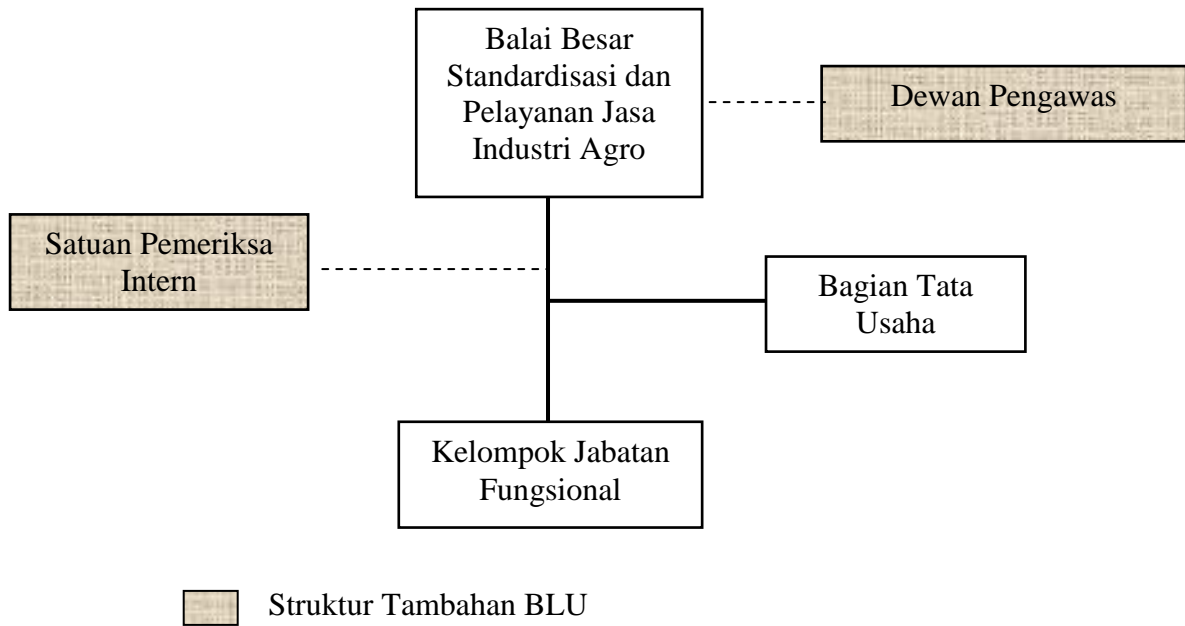
industri prioritas yang akan dikembangkan dan didorong di masa yang akan datang. Pemilihan industri prioritas dimaksudkan agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mudah dalam mengukur kriteria keberhasilannya. Pengembangan setiap industri prioritas di masa depan dirumuskan ke dalam pola pengembangan secara terinci yang meliputi: strategi, sasaran dan pokok-pokok rencana aksi pengembangan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Salah satu pokok-pokok rencana aksi bidang industri agro pada jangka menengah ditujukan untuk memperkuat rantai nilai (*value chain*) melalui penguatan struktur, diversifikasi, peningkatan nilai tambah, peningkatan mutu serta perluasan penguasaan pasar. Sedangkan jangka panjang difokuskan pada upaya pembangunan industri agro yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

BBSPJIA sebagai unit pelaksana teknis bidang dilingkungan BSKJI berperan mendorong tumbuhnya industri agro nasional, BBSPJIA secara internal mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan diri melalui peningkatan kompetensi serta memberikan jasa layanan teknis kepada industri kecil menengah dan besar. Dengan melaksanakan tugas tersebut, maka diharapkan akan berkembang industri agro yang kuat dan berdaya saing sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan mendorong percepatan pembangunan industri nasional. Pada dasarnya peningkatan kompetensi BBSPJIA merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran BBSPJIA dalam menunjang program pembangunan industri agro maupun meningkatkan jasa pelayanan teknis yang diberikan kepada masyarakat industri.

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri disebutkan bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dinyatakan bahwa BBSPJIA dipimpin oleh seorang Kepala yang

membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi BLU-BBSJIA.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BLU-BBSPJIA

BAB II

RENCANA KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Untuk melaksanakan program dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) menyusun kegiatan dan *output*, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BBSPJIA Tahun Anggaran (TA) 2025–2029 dan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA. 2025.

Total pagu awal anggaran BBSPJIA TA. 2025 sebesar Rp 43.216.257.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.416.257.000,- dan PNPB BLU sebesar Rp 29.800.000.000,-. Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka BBSPJIA mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 5.833.697.000,- yang meliputi Rupiah Murni sebesar Rp 2.520.494.00,- dan PNPB sebesar Rp 3.464.902.000,-. Sehingga pagu efektif BBSPJIA menjadi Rp 37.444.096.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 11.108.998.000,- dan PNPB BLU sebesar Rp 26.335.098.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu:

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri 2 (dua) KRO yaitu:
 - ✓ 6077.BAD: Pelayanan Publik Kepada Industri
 - ✓ 6077.CAH: Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang terdiri 3 (tiga) KRO, yaitu :
 - ✓ 6042.EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - ✓ 6042.EBB : Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 - ✓ 6042.EBC : Layanan Manajemen SDM Internal

**Tabel 2.2a. Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBSPJIA
TA. 2025 (Revisi ke-00)**

KODE	PROGRAM/KRO	Volume KRO		Anggaran
		Volume	Satuan	
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			12.169.080.000
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2298	Industri	10.619.080.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5	Unit	1.550.000.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen			31.047.177.000
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	30.437.177.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31	Unit	190.000.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	420.000.000
Total				43.216.257.000

Setelah dilakukan revisi ke-6 DIPA, maka rincian Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2b. Program dan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBSPJIA
TA. 2025 (Revisi ke-06)**

KODE	PROGRAM/KRO	Volume KRO		Anggaran
		Volume	Satuan	
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			12.169.080.000
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2298	Industri	10.619.080.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	5	Unit	1.550.000.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen			31.047.177.000
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	Layanan	30.437.177.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31	Unit	190.000.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	80	Orang	420.000.000
Total				43.216.257.000

Berdasarkan kelompok Jenis Belanja, maka rincian anggaran BBSPJIA TA. 2025 pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Rincian Pagu Efektif BBSPJIA berdasarkan Jenis Belanja
TA. 2025**

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	%
I	Rupiah Murni (RM)	10,895,763,000	29.27%
1	Belanja Pegawai [51]	10,142,889,000	
2	Belanja Barang [52]	752,874,000	
3	Belanja Modal [53]	-	
II	PNBP BLU	26,335,098,000	70.73%
1	Belanja Pegawai [51]	-	
2	Belanja Barang [52]	26,335,098,000	
3	Belanja Modal [53]	-	
Total		37,230,861,000	

Pada bulan Mei 2025 telah dilakukan revisi anggaran berupa relaksasi blokir anggaran, dimana pagu anggaran sebesar Rp 213.235.000,- yang tadinya diblokir, dapat digunakan untuk kegiatan layanan perkantoran berupa pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin serta langganan listrik.

Sehubungan telah terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian, maka tunjangan kinerja dianggarkan dari anggaran PNBPN BLU sendiri dan dikategorikan sebagai Belanja Barang yang bersumber dari PNBPN BLU.

Penjelasan *output* semua rencana kegiatan/komponen/subkomponen yang akan dihasilkan sebagai berikut:

6077. BAD Pelayanan Publik kepada Industri

KRO ini terdiri dari 9 (sembilan) Rincian Output (RO) sesuai dengan jenis layanan teknis yang ada di BBSPJIA. Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan teknis pengujian BBSPJIA (1.300 Industri)
- 2) Jasa pelayanan teknis kalibrasi BBSPJIA (480 Industri)
- 3) Jasa pelayanan teknis sertifikasi BBSPJIA (360 Industri)

- 4) Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis BBSPJIA (60 Industri)
- 5) Jasa pelayanan inspeksi teknik BBSPJIA (35 Industri)
- 6) Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri BBSPJIA (3 Industri)
- 7) Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri BBSPJIA (10 Industri)
- 8) Jasa penyelenggaraan uji profisiensi BBSPJIA (50 Industri)

Output yang dihasilkan berfungsi untuk :

1. Memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap jasa layanan pengujian berbagai bahan baku dan produk pangan.
2. Membantu pemeliharaan keakuratan berbagai peralatan yang dimiliki oleh pelaku industri dan institusi melalui kalibrasi berbagai peralatan tersebut.
3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/industri dan aparat pemerintah dalam hal teknologi pengolahan (Pangan dan Non-pangan), pengujian, kalibrasi, dan sistem manajemen mutu untuk pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Merumuskan, menetapkan, merevisi standar yang digunakan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam perumusan SNI.
5. Membantu pelaku industri atau institusi dalam menyusun dan menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan pangan, dan *set-up* Laboratorium Uji.
6. Meningkatkan peran dan kinerja BBSPJIA dalam membantu dan melayani masyarakat industri yang membutuhkan jasa layanan sertifikasi baik produk, manajemen mutu maupun sistem keamanan pangan.
7. Membantu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui perancangan peralatan produk, proses pengolahan industri agro, dan merevitalisasi peralatan proses pengolahan industri agro.
8. Menyediakan jasa litbang untuk membantu industri pangan maupun non pangan dalam meningkatkan mutu maupun diversifikasi produk, pengkajian teknologi untuk proses pengolahan maupun minimalisasi kerusakan mutu produk selama proses pengolahan maupun penyimpanan, uji coba produksi untuk studi pasar (*market research*), dan pengembangan produk baru.

9. Membantu dunia industri dalam hal menjaga keamanan pangan melalui jasa uji kecukupan panas, penanganan pencemaran lingkungan, dan uji profesiensi.

6077. CAH Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan BBSPJIA (5 unit)

Output ini bertujuan untuk pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian, Penyelenggaraan Uji Profisiensi dan Inspeksi Teknis.

6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

KRO ini terdiri dari 2 (dua) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) 958. Layanan Hubungan Masyarakat (3 layanan), yang bertujuan sebagai sarana promosi layanan jasa teknis yang ada di BBSPJIA.
- 2) 994. Layanan Perkantoran (1 layanan), bertujuan untuk memenuhi hak atau kompensasi yang diterima oleh pegawai serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BBSPJIA.

6042.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan Sarana Internal (31 Unit)

Output ini terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:

- 052. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
- 053. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran

6042.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal

KRO ini terdiri dari 1 (satu) Rincian Output (RO). Adapun RO dan volume RO BBSPJIA pada TA. 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan Pendidikan dan Pelatihan (80 orang).

Kekuatan Sumber Daya Manusia di BBSPJIA berjumlah 180 orang, yang terdiri dari 120 PNS, P3K sebanyak 14 orang dan Non PNS sebanyak 46 orang. BBSPJIA menerapkan program kaderisasi SDM sejak CPNS sampai dengan PNS. Pegawai Non PNS juga diberikan kesempatan yang sama. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui pengiriman Pegawai BBSPJIA untuk mengikuti berbagai diklat ataupun pelatihan.

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan BBSPJIA, maka perlu diuraikan dan ditetapkan sasaran strategis kegiatan dan indikator kinerjanya. Sasaran strategis merupakan *outcome* dari kegiatan dan *outcome* kegiatan diperoleh apabila *output* kegiatan dapat berfungsi. Tabel 2.4 berikut menggambarkan Sasaran Strategis BBSPJIA TA. 2025 atau disebut Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBSPJIA Tahun 2025.

Tabel 2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBSPJIA TA. 2025

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,72
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	3.750
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Persen	95,00
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	Nilai	30
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	4,35
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	20.600
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	Persen	8,40
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	75,00
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,3
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	80
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,20

SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	50
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	65,00
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	79,90
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	75

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	12.169.080.000
WA	Program Dukungan Manajemen	31.047.177.000
TOTAL		43.216.257.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri

Kepala Balai Besar Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Agro


Andi Rizaldi


Yuni Herlina Harahap

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Rencana Aksi untuk mencapai target-target pada Perjanjian Kinerja TA. 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rencana Aksi TA. 2025

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Tj	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	25	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	50	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	75	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	100	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3,750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25	Mengimdetifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	50	Mengimdetifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	75	Mengimdetifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	100	Mengimdetifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis
SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	95,00	Persen	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	30	Nilai	25	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan IV

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4,35	Persen	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20,600	Hasil Layanan	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV
SK3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	25	Menginventarisir kebutuhan pelatihan Pegawai, memantau tingkat disiplin pegawai	50	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	75	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	100	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, memantau tingkat disiplin pegawai
SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	25	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	50	Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	75	Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	100	Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	25	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	50	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	75	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	100	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen	25	Menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan audit kinerja oleh Inspektorat Kemenperin	50	Menyusun Rencana Aksi dan Tindak Lanjut hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenperin	75	Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenperin	100	Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kinerja serta melaporkan hasil tindak lanjut audit kinerja kepada Inspektorat
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	65,00	Nilai	25	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	50	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	75	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	100	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis
SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	25	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	50	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	75	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	100	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	25	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	50	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	75	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	100	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu
SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	75	Persen	25	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	50	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	75	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	100	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif

Hasil yang telah dicapai untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis kegiatan pada Perjanjian Kinerja BBSPJIA TA. 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 3.2. Capaian Penjanjian Kinerja BBSPJIA Triwulan II TA. 2025

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Realisasi s.d TW I
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	3,79
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	1.917
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	95,00	Persen	100
		2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	30	Nilai	77,89
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4,35	Persen	<i>On progress</i>
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	10.363
		3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>	8,40	Persen	3.68
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	66,46
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	<i>On progress</i>
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	<i>On progress</i>
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	<i>On progress</i>
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	<i>On progress</i>
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen	<i>On progress</i>
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	65,00	Nilai	<i>On progress</i>
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	83,00
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	100
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	75	Persen	56,25

3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya target pada Perjanjian Kinerja BBSPJIA TA. 2025, maka telah disusun Rencana Aksi. Hasil yang telah dicapai untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis kegiatan sampai dengan Triwulan II TA. 2025, adalah sebagai berikut:

1) Tujuan: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	3,79	101,88%	55	56	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2025 5. Mengevaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perbaikan layanan jasa industri
	2 Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3.750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi	1.917	51,12	55	56	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi target pasar 2. Evaluasi layanan yang ada 3. Penyusunan strategi pemasaran 4. Peningkatan <i>branding</i> dan <i>awareness</i> 5. Sosialisasi dan edukasi 6. Kolaborasi dan kemitraan

Tujuan mempunyai Indikator Kinerja:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik. Setelah dilakukan perhitungan pada jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, inspeksi teknis, verifikasi TKDN dan uji profesiensi pada periode April hingga Juni 2025 maka didapat indeks IKM **3,79** untuk BBSPJIA. Detil angka komponen IKM dan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II

Jasa Layanan	Σ	Indeks Kepuasan Pelanggan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Pengujian	146	3.70	3.78	3.73	3.71	3.60	3.73	3.67	3.75	3.62	3.68
Kalibrasi	37	3.80	3.84	3.81	3.78	3.73	3.78	3.78	3.89	3.76	3.78
Sertifikasi	27	3.67	3.67	3.59	3.48	3.56	3.74	3.78	3.81	3.70	3.67
Pelatihan	81	3.68	3.62	3.56	3.62	3.57	3.72	3.81	3.83	3.78	3.64
Konsultasi	3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Inspeksi Teknis	16	3.72	3.75	3.81	3.56	3.38	3.69	3.81	3.88	3.88	3.75
Verifikasi TKDN	3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Uji Profisiensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlahresponden	313	3.79	3.81	3.79	3.74	3.69	3.81	3.84	3.88	3.82	3.79

Keterangan :

U1	: Persyaratan	U6	: Kompetensi pelaksana
U2	: Sistem, mekanisme, prosedur	U7	: Perilaku pelaksana
U3	: Waktu pelayanan	U8	: Penanganan pengaduan, saran & masukan
U4	: Biaya/ tarif	U9	: Sarana dan prasarana
U5	: Produk spesifikasi jenis layanan		

b) Kendala

Ada beberapa kendala/permasalahan dalam kegiatan ini, diantaranya:

- Pelanggan enggan mengisi kuesioner.
- Pelanggan cenderung memberikan nilai netral (baik), meskipun puas dengan layanan yang telah diberikan.
- Kebijakan penggunaan Aplikasi SKM (khusus layanan konsultasi, pengujian dan sertifikasi) dari Biro Humas Kemenperin yang tidak mencakup survei persepsi korupsi.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

- Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi *Whatsapp*.
- Menginput ulang data hasil survei (*google sheets*) pada aplikasi SKM untuk laporan BBSPJIA kepada Biro Humas

2) Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri**a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh BBSPJIA. Data jumlah industri pengguna layanan jasa dihitungkan dengan cara menghitung jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di BBSPJIA pada tahun ke-n. Setelah dilakukan perhitungan jumlah industri yang menggunakan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, inspeksi teknis, verifikasi TKDN dan uji profisiensi pada periode Januari hingga Juni 2025 maka didapat jumlah industri yang menggunakan jasa layanan BBSPJIA pada bulan Januari hingga Juni 2025 adalah **1,917** perusahaan industri. Detil jumlah perusahaan industri per jasa layanan dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.4 Data pengguna layanan jasa teknis BBSPJIA bulan Januari – Juni 2025.

Jasa Layanan	Σ Perusahaan/ Industri
Pengujian	727
Kalibrasi	213
Sertifikasi	170
Pelatihan	33
Konsultasi	6
Inspeksi Teknis	11
Uji Profisiensi	288
Sampling	75
Verifikasi TKDN	12
Sewa Aset	6
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	1
Jasa Lainnya	40
Jumlah Industri	1.917

Realisasi pada triwulan ini mencapai 51,12% dari target tahun 2025 sebesar 3.750 perusahaan industri.

b) Kendala

1. Banyak industri, terutama skala kecil dan menengah (UMKM), belum mengetahui manfaat menggunakan layanan BBSPJIA.
2. Beberapa industri lebih memilih lembaga dengan harga lebih murah atau proses yang lebih cepat.
3. Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kegiatan pemasaran/promosi sehingga sulit untuk menjalankan promosi besar-besaran secara masif.
4. Terbatasnya atau kurangnya sistem layanan pelanggan yang responsif untuk menangani pertanyaan atau permintaan industri dengan cepat

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi media sosial, website, dan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak industri.
2. Kunjungan perusahaan dan penawaran konsultasi langsung
3. Publikasi testimoni klien sukses

2) Sasaran Strategis I: Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I						
				Realisasi	Capaian	% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Ralisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	95,00	Persen	100	105,26%	55	56	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM
	2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	30	Nilai	77,89	259,63	55	56	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) terhadap layanan jasa industri 5. Mengevaluasi hasil <i>Net Promoter Score</i> (NPS) terhadap perbaikan layanan jasa industri

Sasaran Kegiatan I mempunyai Indikator Kinerja:

1) Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Service Level Agreement (SLA) pada BBSPJIA adalah komitmen tertulis antara BBSPJIA dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelakuusaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA

$$= \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan:

Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak. Setelah dilakukan perhitungan dan evaluasi jumlah transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada layanan jasa teknis pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan inspeksi teknis pada periode Januari hingga Juni 2025 maka **rata-rata ketepatan waktu bulan Juni 2025 =100 %** (capaian target 95 % per bulan: 105,26 %), sedangkan **rata-rata ketepatan waktu bulan April – Juni 2025 = 100 %** (capaian target 95 % per bulan: 105,26).

Adapun rincian pelayanan tepat waktu sesuai jenis layanan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian

No	Bulan	Σ Sampel Masuk	Σ Target Sampel Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	482	589	589	100	105,26
2.	Februari	856	658	658	100	105,26
3.	Maret	1571	843	843	100	105,26
4.	April	646	732	732	100	105,26
5.	Mei	656	764	764	100	105,26
6.	Juni	1290	1146	1146	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

2. Kalibrasi

No	Bulan	Σ Alat Masuk	Σ Target Sert. Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	392	448	448	100	105,26
2.	Februari	713	701	701	100	105,26
3.	Maret	547	567	567	100	105,26
4.	April	377	322	322	100	105,26
5.	Mei	462	392	392	100	105,26
6.	Juni	729	761	761	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

3. Sertifikasi

No	Bulan	Rata-rata HK	Σ Keg	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	7	55	55	100	105,26
2.	Februari	5	17	17	100	105,26
3.	Maret	6	47	47	100	105,26
4.	April	7	47	47	100	105,26
5.	Mei	7	21	21	100	105,26
6.	Juni	5	69	69	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

4. Inspeksi Teknis

No	Bulan	Σ Titik Proses	Σ Target Sert Selesai	Tepat Waktu	%	Capaian Target 95 % per bulan
1.	Januari	17	31	31	100	105,26
2.	Februari	37	2	2	100	105,26
3.	Maret	18	49	49	100	105,26
4.	April	31	21	21	100	105,26
5.	Mei	15	10	10	100	105,26
6.	Juni	48	28	28	100	105,26
RATA-RATA					100	105,26

b) Kendala

Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan kegiatan sempat terhenti sementara

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan

2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepadapelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden terdiri dari 3 kategori yaitu:

- *Promoters* (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung

merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

- *Passives* (7-8): Pelanggan yang cukup puastetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
- *Detractors* (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

Setelah dilakukan perhitungan NPS dari pelanggan yang menggunakan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, inspeksi teknis, dan verifikasi TKDN pada periode April hingga Juni 2025 maka nilai NPS pelanggan BBSPJIA pada bulan April hingga Juni 2025 adalah **77,89**. Artinya pengguna jasa industri (pelanggan BBSPJIA) **sangat puas** dan **cenderung merekomendasikan** layanan BBSPJIA kepada orang lain. Detil nilai NPS pelanggan per jasa layanan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3.9. *Net Promotor Score* (NPS) Triwulan II

Jasa Layanan	Σ	<i>Net Promotor Score</i> (NPS)	% <i>Promoters</i> (skor 9-10)	% <i>Passives</i> (skor 7-8)	% <i>Detractors</i> (skor 0-6)
Pengujian	146	65.75	69.18	27.40	3.42
Kalibrasi	37	64.86	67.57	29.73	2.70
Sertifikasi	27	77.78	77.78	22.22	0.00
Pelatihan	81	55.56	56.79	41.98	1.23
Inspeksi Teknis	3	100	1000	0	0
Verifikasi TKDN	16	81.25	81.25	18.75	0.00
Jumlah responden	313	77.89	78.94	20.01	1.05

b) Kendala

1. Belum stabilnya tingkat respons
2. Bias dalam pengisian survei
3. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap NPS
4. Hambatan teknis dalam pengumpulan data

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

1. Perlunya komunikasi yang persuasif kepada pelanggan untuk mengisi kuesioner, dan mensosialisasikan terkait penilai tersebut terhadap kredibilitas instansi

2. Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi *whatsapp*

3) Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4,35	Persen	<i>On progress</i>	<i>On progress</i>	55	56	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
	2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600	Hasil Layanan	10.363	50.31	55	56	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
	3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	Persen	3,68	43,81%	55	56	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II
	4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	66,86	88,61%	55	56	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II

Sasaran Strategis II mempunyai Indikator Kinerja:

1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBPN tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBPN layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan II tahun 2025 jumlah penerimaan PNBPN BBSPJIA adalah sebesar Rp 13,580,235,534,-. Sedangkan target persentase peningkatan penerimaan PNBPN tahun 2025 adalah sebesar 4,35% (Rp 31.305.000.000,-). Untuk mencapai target tersebut, BBSPJIA harus meningkatkan kinerja layanan sehingga sisa target penerimaan PNBPN sebesar Rp 17.724.765.000 dapat direalisasikan.

b) Kendala

- Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan seperti TOC meter, Karl fischer (sehingga harus sub kontrak pengujian ke lab lain) AAS GTA, ruang asam berpengaruh terhadap kapasitas laboratorium
- Keterbatasan peralatan pendukung mikrobiologi seperti : membran filtrasi, dan tabung uji

c) Tindak Lanjut

- Pengadaan dan perbaikan infrastruktur standarisasi
- BBSPJIA perlu mengembangkan layanan lain untuk mencapai target penerimaan PNBPN BLU yang telah ditetapkan

2) Jumlah hasil layanan jasa industri

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Pada Triwulan II TA. 2025, realisasi jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan BBPSJIA mencapai 10.363 layanan jasa atau 50,31% dari target 20.600 layanan jasa. Rincian realisasi volume per jasa layanan pada Tabel 3.5, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Volume Layanan BBPSJIA Triwulan II TA. 2025

No.	Jenis Layanan	TW II TA 2025		
		Target	Realisasi	Persentase
1	Pengujian	10,341	5501	53.20%
2	Kalibrasi	7,519	3220	42.82%
3	Sertifikasi	721	368	51.04%
4	Sampling	299	145	48.49%
5	Uji Profisiensi	731	803	109.85%
6	Bimbingan dan pendampingan teknis industri	848	151	17.81%
7	Konsultasi	10	6	60.00%
8	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	6	3	50.00%
9	Inspeksi Teknis	125	166	132.80%
	Total	20,600	10,363	50.31%

b) Kendala

Kendala yang dihadapi antara lain persaingan dengan lembaga sejenis terutama dengan Laboratorium/Perusahaan swasta semakin ketat

c) Tindak lanjut

Meningkatkan kualitas terutama waktu layanan (*delievery time*) agar dapat bersaing dengan kompetitor

3) Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Pada triwulan II 2025, nilai *Revenue on Asset* (RoA) BBSPJIA dapat dipaparkan sebagai berikut:

Penerimaan PNB (per tanggal 30 Juni) = Rp 13,580,235,534,-

Nilai asset BBSPJIA (Tahun 2024) = Rp 369,124,135,766,-

$$\text{Nilai RoA} = \frac{\text{Penerimaan PNB}}{\text{Nilai Asset}}$$

$$\text{Rasio RoA} = \frac{13,580,235,534}{369,124,135,766}$$

Rasio RoA = 3.68 %

b) Kendala

Belum ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi/Tindak lanjut

Peningkatan layanan agar penerimaan juga dapat meningkat

4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Untuk triwulan II 2025, nilai POBO BBSPJIA dapat diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan PNB (per tanggal 30 Juni) = Rp 13,580,235,534,-

Biaya operasional selama Januari – Juni = Rp 20,433,361,366,-

$$\text{Rasio POBO} = \frac{\text{Penerimaan PNB}}{\text{Biaya operasional}}$$

$$\text{Rasio POBO} = \frac{13,580,235,534}{20,433,361,366}$$

Rasio POBO = **66.46 %**

b) Kendala

Belum ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi/Tindak lanjut

Peningkatan layanan agar penerimaan juga dapat meningkat

4) Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya SDM yang profesional.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya SDM yang profesional	1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	0	0 %	25	26	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	Melaksanakan inhouse training dan juga mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan eksternal

Sasaran Kegiatan III terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja:

1) Indeks profesionalitas ASN (IPASN)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sampai dengan Triwulan II TA. 2025, hasil perhitungan rata-rata indeks profesionalitas ASN BBSPJIA belum ada karena dari pihak Biro OSDM belum melakukan pengukuran.

b) Kendala

Belum ada kendala berarti

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Agar indeks profesionalitas ASN BBSPJIA semakin meningkat, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong para pegawai BBSPJIA untuk

meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan ataupun diklat.

5) Sasaran Kegiatan IV: Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Ralisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	0	0	55	56	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI
	2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	0	0	55	56	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan
	3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	0	0	55	56	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM

Sasaran Kegiatan IV terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja

1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi

Sampai dengan Triwulan II TA. 2025, hasil perhitungan jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI masih dalam proses

b) Kendala

Tidak ada.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Berkordinasi dengan bagian terkait yaitu bagian umum Sekretariat BSKJI agar perhitungan jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI dapat diukur dengan baik.

2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sehubungan dengan diterapkannya Keputusan Menteri Perindustrian No. 2343 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka roadmap yang telah ditetapkan harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah dengan pengisian kertas kerja kegiatan SPBE yang harus dilaksanakan dengan target 80. Secara umum, kegiatan terkait SPBE yang telah dilakukan hingga Triwulan 1 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Aktivitas	Keterangan
1	21 Februari 2025	Pengajuan akun Lemari Online untuk BBSPJIA	Telah aktif untuk menyimpan data dukung capaian SPBE
2	11 Maret 2025	Mengikuti rapat konsultasi anggaran SPBE	Perlu membuat permohonan kegiatan yang akan di clearance
3	18 Maret 2025	Mengikuti rapat konsultasi aplikasi SPBE	Mengkonfirmasi aplikasi yang akan dipilih untuk dilaporkan dokumentasi tahapan pengembangannya

Hasil konsultasi anggaran SPBE (11 Maret 2025) berdasarkan notulensi rapat Pusdatin :

- Anggaran 2025 BBSPJIA terkait efisiensi terdapat 3 kelompok kegiatan yang terkait TIK yaitu Pengembangan E-Layanan

menggunakan BLU dan masih dibintang yang kemungkinan akan hilang, Layanan Perkantoran untuk pemeliharaan rutin menggunakan RM yang dibintang sehingga kemungkinan hilang dan ditarik dengan BLU khusus belanja jasa internet, Layanan Sarana Internal untuk belanja modal peralatan dan mesin menggunakan RM yang dibintang dan di backup dengan BLU.

- Kebutuhan TI BBSPJIA 2025 yang harus dilakukan yaitu rencana pengembangan dashboard dan peremajaan jaringan serat optik.
- Pengembangan dashboard merupakan kontrak kinerja dengan Kemenkeu untuk Kegiatan Modernisasi BLU yang harus dicapai. Namun, karena anggarannya belum ada maka akan menggunakan saldo kas BLU.
- Peremajaan jaringan serat optik dari sisi usia memang harus diganti untuk maintenance karena penggunaan koneksi di area Lab semakin meluas.
- Pengembangan dashboard belum tercantum pada POK definitif tahun 2025 dan belum didaftarkan pada arsitektur SPBE sehingga membutuhkan clearance anggaran ke Pusdatin.
- Layanan balai yang BLU akan bergabung dengan SIPPT yang direncanakan untuk tahun 2027, saat ini SIPPT masih dikembangkan untuk layanan PNBPN. BSKJI masih memberikan keleluasaan untuk balai yang BLU mengembangkan aplikasinya untuk mengejar KPI BLU salah satunya modernisasi BLU yang didalamnya terdapat beberapa indikator kinerja yang terkait IT.
- SIPPT rencananya tidak mengembangkan dashboard, namun akan dikembangkan dashboard terpisah dari SIPPT khusus untuk dashboard BLU yang mengakomodir untuk seluruh balai BLU. Dashboard ini akan dikembangkan ketika semua layanan sudah selesai diakomodir pada SIPPT.
- Pengembangan dashboard dapat disetujui karena pengembangan SIPPT pada peta rencana akan selesai pada tahun 2027. BBSPJIA harus mengirimkan KAK, RAB dan *template excel clearance*

sebagai lampiran nota dinas kepada Pusdatin untuk dilakukan persetujuan *clearance*.

Hasil konsultasi aplikasi SPBE (18 Maret 2025) :

1. Aplikasi TTE yang kaitannya SPBE dapat direview kebijakan SPBE terkait koneksi API antar instansi/kementerian
 1. Untuk teknis kendala TTE perlu bersurat tersendiri ke Pusdatin yang nantinya akan didelegasikan ke tim aplikasi dan jaringan
 2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan BBIA
 - a) Untuk Tahun 2025 melanjutkan pembuatan permohonan *clearance* ke Pusdatin untuk kegiatan Pengembangan Dashboard Layanan
 - b) Untuk poin implementasi layanan, saat tahap pengembangan aplikasi di tiap tahapannya juga dikonsultasikan ke pusdatin
 - c) Untuk pencapaian target LKE akan diklaim di akhir tahun, pencapaiannya perlu didetailkan saat *cascading*

Untuk sementara Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BBSPJIA belum bisa diukur dan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Pusdatin Kementerian Perindustrian.

b) Kendala

Belum ada kendala berarti.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Melengkapi data dukung di Triwulan III

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana

Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Sampai dengan Triwulan II TA. 2025, hasil perhitungan indeks pelayanan publik BBSPJIA belum dapat disajikan.

b) Kendala

Data yang diperlukan untuk perhitungan nilai indeks Pelayanan Publik BBSPJIA belum lengkap.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Berkordinasi dengan bagian terkait agar data yang diperlukan untuk perhitungan nilai indeks Pelayanan Publik BBSPJIA tersedia dengan baik

6. Sasaran kegiatan V: Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I				
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi	
						Target	Ralisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen	0	0	55	56	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen
	2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	65,00	Nilai	0	0	55	56	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang

harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Pada tanggal 3-7 Maret 2025. Tim APIP dari Inspektorat III telah melaksanakan audit kinerja di BBSPJIA.

BBSPJIA telah menyampaikan rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Maret 2025.

b) Kendala

Belum ada.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

BBSPJIA akan terus berkordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal.

2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA. 2025 belum dilakukan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh pihak terkait yang dalam hal ini dari biro umum Kementerian Perindustrian. Direncanakan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh tim dari biro umum akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II meliputi pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019 dan pelaksanaan bimbingan teknis kearsipan bagi SDM internal BBSPJIA di bulan Juni 2025.

b) Kendala

Belum ada kendala yang berarti

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Perlu koordinasi intensif dengan bagian umum Sekretariat BSKJI dan Biro Umum kemenperin

7. Sasaran Kegiatan VI: Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	83,00	103,88%	55	56	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik
	2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	100	105,26%	55	56	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu

Sasaran Strategis VI terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja:

1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Kegiatan penilaian SAKIP Tahun 2024 di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenperin pada bulan Maret 2025 dan untuk sementara hasil penilaian dari tim APIP menyatakan BBSPJIA mendapatkan nilai 83,00 dengan predikat A. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target sebesar 79,90 maka capaiannya sebesar 104 %/. Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP BBSPJIA Tahun 2023 yaitu 79,85 maka ada peningkatan sebesar 4%.

b) Kendala

Adanya perubahan aturan penilaian yang bersifat lebih kompleks sehingga memerlukan penyesuaian dan tindak lanjut yang sangat mendalam

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP agar nilai tahun mendatang dapat meningkat.

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II TA. 2025, BBSPJIA memperoleh Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 95 %. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini mencapai 105,26 %

b) Kendala

Belum ada kendala yang berarti

a) Rekomendasi/Tindak Lanjut

BBSPJIA akan terus meningkatkan kinerja dalam pelaporan anggaran dan keuangan

8. Sasaran Kegiatan VII: Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Sampai dengan Triwulan I			
						% Fisik		Rencana Kegiatan	Realisasi
						Target	Ralisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	75	Persen	56,25	75 %	55	56	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif

Sasaran Strategis VII terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja:

1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan II 2025 ini, nilai persentase Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebesar 56,25 Persen, dimana angka ini bersumber dari data aplikasi SAKTI modul keuangan.

Adapun realisasi tersebut mencapai 75% dari target tahun 2025 sebesar 75 Persen.

b) Kendala

Sampai dengan triwulan II ini belum ada kendala berarti pada penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BBSPJIA

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

Guna menekan nilai impor, terutama pada pengadaan bahan kimia dan penolong, salah satu upaya yang akan dilakukan BBSPJIA adalah dengan melakukan substitusi sebagian bahan kimia impor dengan produk lokal.

Selain itu selalu dilakukan monitoring pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana penarikan anggaran yang telah disusun

3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Capaian kinerja realisasi keuangan penyerapan anggaran BBSPJIA sampai dengan Triwulan II TA. 2025 sebesar Rp 20.558.293.000,- atau 47,57% dari pagu sebesar Rp 43.216.257.000,- dan capaian realisasi fisiknya sebesar 56,00%. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sumber pembiayaan BBSPJIA sampai Triwulan II TA. 2025 ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Sumber	Jenis Belanja	Pagu (ribu)	Realisasi (ribu)	%	Pagu Blokir (ribu)	Pagu Efektif (ribu)	Realisasi dari Pagu Efektif (%)
RM	51 (B. Pegawai)	10,142,889	5,363,982	52.88%	0	10,142,889	52.88%
	52 (B. Barang)	2,973,368	440,922	14.83%	2,007,259	966,109	45.64%
	53 (B. Modal)	300,000	-	0.00%	300,000	-	-
	Total RM	13,416,257	5,804,904	43.27%	2,307,259	11,108,998	52.25%
BLU	52 (B. Barang)	28,210,000	14,628,457	51.86%	2,014,902	26,195,098	55.84%
	53 (B. Modal)	1,590,000	124,932	7.86%	1,450,000	140,000	89.24%
	Total BLU	29,800,000	14,753,389	49.51%	3,464,902	26,335,098	56.02%
RM+BLU		43,216,257	20,558,293	47.57%	5,772,161	37,444,096	54.90%

Realisasi tersebut dapat dijelaskan secara rinci dari KRO Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan I (BAD): Pelayanan Publik Kepada Industri

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
BAD Pelayanan Publik kepada industri	10.619.080	9	9.32	25	26	50	51.75	55	56

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Kegiatan Triwulan II telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan tersebut adalah melaksanakan layanan jasa teknis kepada pelanggan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) BBSPJIA.

Realisasi keuangan dan realisasi fisik Pelayanan Publik Kepada Industri sampai pada Triwulan II TA. 2025 sudah mencapai target.

b) Kendala

Ada beberapa peralatan laboratorium yang memerlukan perbaikan.

c) Rekomendasi/Tindak Lanjut

- 1) Perbaikan peralatan laboratorium sesuai skala prioritas.
- 2) Penambahan kapasitas layanan dengan cara penambahan sarana dan prasarana khususnya peralatan laboratorium.

2. KRO II (CAH): Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Hingga saat ini belum ada aplikasi ALKI dan PP39 yang dapat menunjukkan target keuangan per KRO, sehingga tidak dapat dibandingkan antara target dan realisasi keuangan. Realisasi keuangan

berdasarkan data pada SAKTI. Sedangkan target dan realisasi fisik per KRO menggunakan perhitungan manual BBSPJIA

b) Kendala

Realisasi fisik tidak dapat mencapai sasaran pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (CAH). Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada bulan Januari 2025 mengakibatkan seluruh belanja modal diblokir anggarannya dan tidak ada anggaran belanja modal tersisa

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memastikan ketersediaan anggaran PNBPN dan koordinasi dengan BSKJI selaku pembina BBSPJIA terkait output kegiatan dengan anggaran yang diblokir.

3. KRO I (EBA): Layanan Dukungan Manajemen Internal

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	30.437.177.000	9	9.74	25	26	50	53.90	55	56

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Realisasi keuangan dan realisasi fisik Layanan Dukungan Manajemen Internal pada Triwulan II sudah baik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II TA. 2025 adalah:

A. Layanan Hubungan Masyarakat

Layanan hubungan masyarakat tiga RO yaitu

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
- b. Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI
- c. Pelaksanaan Pemasaran/ promosi/ Pameran/ publikasi Layanan Teknis

B. Layanan Perkantoran.

Layanan Perkantoran pada TA. 2025 terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

(1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan;

(2) Operasional Perkantoran

Realisasi keuangan KRO ini pada Triwulan II TA. 2025 mencapai 53,90%

b) Kendala

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan kendaraan harus sepenuhnya dialihkan ke sumber pembiayaan PNBP

c) Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran harus lebih efisien, hemat berdasarkan skala prioritas

4. KRO V (EBB): Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	190.000	5	0	25	26	40	40.43	55	56

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Untuk RO Layanan Sarana Internal pada Triwulan II TA. 2025 masih dalam tahap persiapan pengadaan peralatan inventaris perkantoran dan peralatan pengolah data dan komunikasi.

b) Kendala

Tidak Ada

c) Rekomendasi

Pengadaan peralatan perkantoran yang bersumber dari PNBP masih harus melihat realisasi penerimaan. Apabila realisasi penerimaan telah mencukupi barulah dilaksanakan pengadaan peralatan perkantoran.

5. KRO VI (EBC): Layanan Manajemen SDM Internal

Output	Pagu (Ribuan Rp)	Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R	S	R	S	R
EBC Layanan Manajemen SDM	420.000	2	0.6	25	26	25	24.75	55	56

Internal

a) Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja

Pegawai BBSPJIA sudah mengikuti berbagai diklat; baik itu teknis ataupun non teknis. Diklat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai BBSPJIA dalam berbagai bidang guna menunjang pelaksanaan Jasa Pelayanan Teknis sesuai TUPOKSI BBSPJIA serta dalam rangka pengembangan karir pegawai BBSPJIA sebagai tenaga/pejabat Fungsional.

b) Kendala

Secara umum, tidak ada kendala pada Kegiatan Layanan Manajemen SDM internal pada sampai dengan Triwulan II ini.

c) Rekomendasi

Sebaiknya dibuat rencana pengembangan kompetensi pegawai BBSPJIA berdasarkan usulan kebutuhan pelatihan dari masing-masing Koordinator serta kebutuhan organisasi. Setiap pegawai diupayakan untuk mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensinya sehingga bermanfaat bagi jalannya organisasi.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hambatan dan kendala pencapaian sasaran kegiatan ataupun kinerja *output* kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**1. Tujuan I: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri**

Kendala umum yang dihadapi yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran.

2. Sasaran I: Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional

Realisasi *delivery time* layanan Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi relatif masih lebih lambat dibandingkan dengan lembaga sejenis terutama dari Laboratorium Swasta. Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan dan membutuhkan waktu yang lama untuk

memperbaikinya, serta *spare part* dan bahan kimia yang inden. Disamping itu, produktifitas kinerja para pegawai khususnya Analis dan Laboran masih perlu ditingkatkan. Selain itu, unit pendukung seperti bagian pengadaan (dalam hal pengadaan bahan kimia) serta bagian umum (dalam hal perbaikan peralatan laboratorium) juga harus meningkatkan kinerjanya agar mendukung kelancaran proses pekerjaan di laboratorium.

3. Sasaran II: Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Kendala yang dihadapi antara lain semakin ketatnya persaingan dengan laboratorium sejenis terutama laboratorium swasta.

4. Sasaran III: Terwujudnya SDM yang profesional

Secara umum. sampai saat ini belum ada kendala untuk sasaran strategis ini. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki membuat pelaksanaan pelatihan bagi para pegawai BBSPJIA harus betul-betul selektif dan berdasarkan skala prioritas.

5. Sasaran IV: Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik

Sampai saat ini belum ada kendala untuk sasaran strategis ini.

6. Sasaran V: Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Sampai saat ini belum ada kendala untuk sasaran strategis ini.

7. Sasaran VI: Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Secara umum. sampai saat ini belum ada kendala untuk sasaran strategis ini. Namun kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan harus ditingkatkan lagi dan dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Inspektorat Jenderal yang tercantum pada Lembar Hasil Evaluasi(LHE) SAKIP 2024..

8. Sasaran VII: Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, kendala yang dihadapi yaitu tingkat ketergantungan terhadap produk impor masih tinggi. Hal ini disebabkan produsen dalam negeri belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Bahkan ada beberapa produk tertentu yang belum ada industrinya di dalam negeri.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

1. KRO I. Pelayanan Publik Kepada Industri

Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan anggaran untuk mendukung operasional layanan menjadi berkurang dan dialihkan untuk mengakomodir kegiatan dukungan manajemen.

2. KRO II. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Kendala yang dihadapi antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium menjadi lebih minim.

3. KRO IV. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Kendala yang dihadapi yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan seperti pemeliharaan gedung tidak bisa maksimal.

4. KRO V. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kendala yang dihadapi antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium dan inventaris kantor harus ditunda.

5. KRO VI. Layanan Manajemen SDM Internal

Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan jumlah SDM yang direncanakan untuk ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan pelatihan menjadi terbatas.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

1. Perbaiki peralatan terkait layanan yang mengalami kerusakan dan modernisasi/penambahan peralatan sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran
2. Melakukan reviu tarif dasar layanan sesuai dengan jenis *timeline services* (SPM).
3. Untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN maka perlu ditingkatkan lagi jumlah pelatihan yang diikuti para Pegawai dan diatur agar keikutsertaan dalam pelatihan agar lebih merata ke semua pegawai sehingga tidak hanya sebagian kecil saja Pegawai yang mengikuti pelatihan.
4. Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas organisasi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Inspektorat Jenderal yang tercantum pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2024.

3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

- ✓ Pelayanan kepada pelanggan (industri) harus tetap dilaksanakan dengan optimal dan prima.
- ✓ Penambahan ruang lingkup layanan dan Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi *Profites* untuk menunjang layanan uji profisiensi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Realisasi Kegiatan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (Perjakin) pada TA. 2025. Pada TA. 2025 ini, DIPA BBSPJIA TA. 2024 terdiri atas 2 Program yaitu:

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang terdiri 4 (empat) KRO yaitu:
 - ✓ 6077.BAD : Pelayanan Publik Kepada Industri
 - ✓ 6077.CAH : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
- 2) Program Dukungan Manajemen, yang terdiri 3 (tiga) KRO, yaitu :
 - ✓ 6042.EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - ✓ 6042.EBB : Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
 - ✓ 6042.EBC : Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi penyerapan anggaran BBSPJIA sampai dengan triwulan II TA. 2025 sebesar Rp 20.558.293.466,- atau **47,57%** dari pagu total sebesar Rp 43.216.257.000,-. Apabila dibandingkan dengan pagu efektif (setelah efisiensi anggaran) sebesar Rp 37.444.096.000,- maka realisasi keuangan mencapai **54,90%** serta capaian realisasi fisiknya sebesar 56,00%. Realisasi keuangan terhadap pagu efektif BBSPJIA pada triwulan II ini berada diatas target BSKJI yaitu sebesar **51.19%**.

Realisasi PNBP sampai dengan bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp 13.580.235.534,- atau **45,57%** dari target PNBP 2025 sebesar Rp 29.800.000.000,-. Diharapkan pada triwulan berikutnya, jumlah volume layanan serta PNBP akan kembali meningkat dan memenuhi target yang ditetapkan.

4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai sasaran dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIA Tahun 2025 yaitu adanya beberapa indikator kinerja yang outputnya baru akan tercapai di triwulan III dan IV sehingga pada

triwulan II, kegiatan yang terkait pencapaian target indikator kinerja ini masih dalam proses pelaksanaan.

Hambatan dan kendala umum secara keseluruhan dalam mencapai target kinerja output kegiatan adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran yang semula bisa diakomodir oleh rupiah murni menjadi sangat terbatas dan harus ditanggulangi dengan anggaran PNBP BLU, yang pada akhirnya kegiatan yang dibiayai PNBP menjadi tidak maksimal. Blokir anggaran pada pengadaan peralatan laboratorium juga mengganggu kelancaran pelaksanaan layanan jasa teknis. Beberapa peralatan yang sangat dibutuhkan untuk menggantikan peralatan yang sudah rusak menjadi tertunda pengadaannya. Selain itu, persaingan dengan kompetitor terutama yang berasal dari swasta semakin ketat. Hal ini berdampak pada adanya pelanggan yang berpindah dari BBSPJIA.

4.3 Langkah Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala yang dihadapi maka BBSPJIA perlu melakukan beberapa langkah tindak lanjut yaitu:

- Perbaiki peralatan yang mengalami kerusakan dan modernisasi/penambahan peralatan sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran .
- Penambahan ruang lingkup layanan
- Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi *Profites* untuk menunjang layanan uji profisiensi
- Melakukan reviu tarif dasar layanan sesuai dengan jenis *timeline services* (SPM)

RENCANA AKSI TAHUN 2025

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Tj	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72	Indeks	25	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	50	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	75	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei	100	Membuat kuesioner survei di google form; Melaksanakan Survei; Mengolah data hasil survei
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3,750	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	50	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	75	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis	100	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombing dan pendampingan teknis
SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	95,00	Persen	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	30	Nilai	25	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan IV
SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4,35	Persen	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	20,600	Hasil Layanan	25	Mengidentifikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	50	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	75	Pengadaan utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	100	Laporan pengadaan dan aplikasi utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,40	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan IV
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75,00	Persen	25	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan I	50	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	75	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan III	100	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan IV
SK3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3	Indeks	25	Menginventarisir kebutuhan pelatihan Pegawai, memantau tingkat disiplin pegawai	50	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	75	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	100	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai
SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	25	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	50	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	75	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	100	Persiapan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	25	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	50	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	75	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	100	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20	Indeks	25	Melakukan pelayanan sesuai SPM	50	Melakukan pelayanan sesuai SPM	75	Melakukan pelayanan sesuai SPM	100	Melakukan pelayanan sesuai SPM
SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50	Persen	25	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	50	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	75	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	100	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen

Kode.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Sampai dengan Triwulan I		Sampai dengan Triwulan II		Sampai dengan Triwulan III		Sampai dengan Triwulan IV		
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	65,00	Nilai	25	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	50	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	75	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis	100	Pelaksanaan sistem kearsipan secara tertib dan sistematis
SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90	Nilai	25	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	50	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	75	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	100	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00	Nilai	25	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	50	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	75	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu	100	Melaporkan keuangan secara transparan dan tepat waktu
SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	75	Persen	25	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	50	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	75	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	100	Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif

Bogor, Januari 2025
 Penanggung Jawab Kegiatan
 dan Pelayanan Jasa Industri Agro



Yuni Herlina Harahap
 NIP. 197606032006042001

**REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN II TA. 2025
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
						% Fisik		Rencana	Realisasi				
						Target Antara	Realisasi						
7	8	9	10	11	12	13	14						
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,72 Indeks	3,79	101,88	55	56	Membuat kuesioner survei di google form. Melaksanakan Survei. Mengolah data hasil survei	1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan dengan layanan yang telah diberikan. 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 5. Mengevaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perbaikan layanan jasa industri	• Pelanggan cenderung memberikan nilai netral (baik), meskipun puas dengan layanan yang telah diberikan. • Kebijakan penggunaan Aplikasi SKM (khusus layanan konsultasi, pengujian dan sertifikasi) dari Biro Humas Kementerian yang tidak mencakup survei persepsi konsumi	- Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi Whatsapp. • Menginput ulang data hasil survei (google sheets) pada aplikasi SKM untuk laporan BBSPIJA kepada Biro Humas	Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Kerja sama	1 Bulan
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	3,750 Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	1,917	51,12	55	56	Mengidentifikasi utilitas layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perckayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta bombangan dan pendampingan teknis	1. Identifikasi target pasar 2. Evaluasi layanan yang ada 3. Penyusunan strategi pemasaran 4. Peningkatan branding dan awareness 5. Sosialisasi dan edukasi 6. Kolaborasi dan kemitraan	1. Banyak industri, terutama skala kecil dan menengah (UMKM), belum mengetahui manfaat menggunakan layanan BBSPIJA. 2. Banyak lembaga serupa yang menawarkan layanan serupa, baik dari pemerintah maupun swasta. 3. Beberapa industri lebih memilih lembaga dengan harga lebih murah atau proses yang lebih cepat. 4. Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kegiatan pemasaran/promosi sehingga sulit untuk menjalankan promosi besar-besaran secara masif. 5. Terbatasnya atau kurangnya sistem layanan pelanggan yang responsif untuk menangani pertanyaan atau permintaan industri dengan cepat	1. Penambahan anggaran untuk pemasaran dan promosi, untuk meningkatkan citra dan daya jangkau pengenalan layanan jasa yang dimiliki BBSPIJA. 2. Mengoptimalkan media sosial, website, dan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak industri. 3. Rutin mengadakan acara edukatif dan kolaborasi dengan asosiasi industri. 4. Mengunjungi perusahaan dan menawarkan konsultasi langsung 5. Publikasi testimoni klien sukses	Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Kerja sama	1 Bulan
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	95 Persen	100	105,26	55	56	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan kegiatan sempat terhenti sementara	Melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan	Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Kerja sama	1 Bulan
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	30 Nilai	77,89	259,63	55	56	Melakukan perhitungan nilai NPS Triwulan I	1. Menyusun kuesioner survei 2. Menentukan responden pengguna layanan 3. Menyampaikan atau mengirimkan kuesioner kepada responden 4. Menghitung nilai Net Promoter Score (NPS) terhadap layanan jasa industri 5. Mengevaluasi hasil Net Promoter Score (NPS) terhadap perbaikan layanan jasa industri	1. Belum stabilnya tingkat respons 2. Bias dalam pengisian survei 3. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap NPS 4. Hambatan teknis dalam pengumpulan data	1. Perlu komunikasi yang persuasif kepada pelanggan untuk mengisi kuesioner, dan mensosialisasikan terkait penilaian tersebut terhadap kredibilitas instansi 2. Memonitor jumlah pengisian kuesioner, jika terdapat pelanggan yang belum mengisi maka petugas akan mengirimkan kuesioner ulang melalui aplikasi whatsapp	Ketua Tim Pengembangan Usaha dan Kerja sama	1 Bulan
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4,35 Persen	on progress	on progress	55	56	Mengidentifikasi utilitas layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perckayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilitas layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perckayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	- Beberapa peralatan laboratorium mengalami kerusakan seperti TOC master, Karl Fischer (sehingga harus siap kontrak pengujian ke lab lain) AAS GTA, ruang asam berpengaruh terhadap kapasitas laboratorium - Keterbatasan peralatan pendukung mikrobiologi seperti: membran filtrasi, dan tabung uji	- Pengadaan dan perbaikan infrastruktur standarisasi - BBSPIJA perlu mengembangkan layanan lain untuk mencapai target penerimaan PNBP BLU yang telah ditetapkan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Pengujian dan kalibrasi serta Tim Umum	1 Bulan
		Jumlah hasil layanan jasa industri	20.600 Hasil Layanan	10,363	50,31	55	56	Mengidentifikasi utilitas layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perckayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Mengidentifikasi utilitas layanan jasa industri di dalam negeri yang meliputi, rancang bangun dan perckayasaan di bidang industri, standarisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis	Kendala yang dihadapi antara lain persaingan dengan lembaga sejenis terutama dengan Laboratorium Perusahaan swasta semakin ketat	Meningkatkan kualitas terutama waktu layanan (delivery time) agar dapat bersaing dengan kompetitor	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Pelayanan Jasa Industri	1 Bulan
		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,4 Persen	3,68	43,81	55	56	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	Melakukan perhitungan nilai RoA triwulan II	Belum ada kendala yang berarti	Peningkatan layanan agar penerimaan juga dapat meningkat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Keuangan	1 Bulan
		Rasio Penerimaan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	75 Persen	73,31	97,75	55	56	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	Melakukan perhitungan nilai rasio POBO Triwulan II	Belum ada kendala yang berarti	Peningkatan layanan agar penerimaan juga dapat meningkat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Keuangan	1 Bulan
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 Indeks	0	0,00%	55	56	Melaksanakan pelatihan/diklat peningkatan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan, dan memantau tingkat disiplin pegawai	Melaksanakan inhouse training dan juga mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan eksternal	Belum ada kendala yang berarti	Agar indeks profesionalitas ASN BBSPIJA semakin meningkat, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong para pegawai BBSPIJA untuk meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan ataupun diklat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kepegawaian	1 Bulan
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	0	0	55	56	Penyusunan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	Penyusunan dan Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI	Belum ada kendala yang berarti	Berkordinasi dengan bagian terkait yaitu bagian umum Sekretariat BSKJI agar perhitungan jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI dapat diikut dengan baik	Ketua Tim SOPTIDI	1 Bulan
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80 Persen	0	0	55	56	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	Perhitungan dan evaluasi tingkat SPBE Triwulan	Belum ada kendala yang berarti	Melengkapi data dukung di Triwulan 2	Ketua Tim SOPTIDI	1 Bulan
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,20 Indeks	0	0,00	55	56	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Melakukan pelayanan sesuai SPM	Data yang diperlukan untuk perhitungan nilai indeks Pelayanan Publik BBSPIJA belum lengkap	Berkordinasi dengan bagian terkait agar data yang diperlukan untuk perhitungan nilai indeks Pelayanan Publik BBSPIJA tersedia dengan baik	Ketua Tim Pelayanan Jasa Industri	1 Bulan
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50 Persen	0	0,00	55	56	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	Mengoptimalkan fungsi SPI secara independen	Belum ada	BBSPIJA akan terus berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Tata Usaha	1 Bulan
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	65,00 Nilai	0	0,00	55	56	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019	Pengelolaan kearsipan internal merujuk pada unit kearsipan sesuai peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2019	Belum ada kendala yang berarti	Perlu koordinasi intensif dengan bagian umum Sekretariat BSKJI dan Biro Umum kementerian	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Umum	1 Bulan
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,90 Nilai	83,00	103,88	55	56	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik	Menyusun dokumen AKIP sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta diarsipkan dengan baik - Mengikuti evaluasi penilaian SAKIP satker di lingkungan BSKJI	Adanya perubahan aturan penilaian yang bersifat lebih kompleks sehingga memerlukan penyusunan dan tindak lanjut yang sangat mendalam	Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP agar nilai tahun mendatang dapat meningkat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Program dan Pelaporan	1 Bulan
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,00 Nilai	100	105,26	55	56	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat	Menginput pemutakhiran perencanaan dan pelaporan anggaran secara tepat waktu	Belum ada kendala yang berarti	BBSPIJA akan terus meningkatkan kinerja dalam pelaporan anggaran dan keuangan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Keuangan dan Tim Program dan Pelaporan	1 Bulan
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	75 Persen	0	0,00	55	56	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	Penyusunan dokumen Pengadaan barang dan jasa dari perusahaan lokal yang kompetitif	Belum ada kendala berarti pada penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BBSPIJA	Guna menekan nilai impor, terutama pada pengadaan bahan kimia dan penolong, salah satu upaya yang akan dilakukan BBSPIJA adalah dengan melakukan substitusi sebagian bahan kimia impor dengan produk lokal	PPK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 minggu

